KEPUTUSAN WALI KOTA

Nomor 000.7.2 / 298 / 2026

Lampiran VII

PERUBAHAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 telah tersusun.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dan 2026 merupakan tahap transisi dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan RPJPN 2025-2045, Ranwal RPJMN 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Rancangan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 dan Perwali Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025- 2029. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 ini memperhatikan arah kebijakan dan perencanaan serta proyeksi penganggaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2027. Diharapkan nantinya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat menjadi dasar Rencana Kerja APBD Tahun 2027.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan.

Salatiga, Agustus 2026
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SALATIGA

SRI SARWANTI, S.H,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670611 199303 2 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 telah tersusun.

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dan 2026 merupakan tahap transisi dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan RPJPN 2025-2045, Ranwal RPJMN 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Rancangan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 dan Perwali Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025- 2029. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 ini memperhatikan arah kebijakan dan perencanaan serta proyeksi penganggaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2027. Diharapkan nantinya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat menjadi dasar Rencana Kerja APBD Tahun 2027.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan.

Salatiga, Agustus 2026
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SALATIGA

SRI SARWANTI, S.H,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670611 199303 2 006

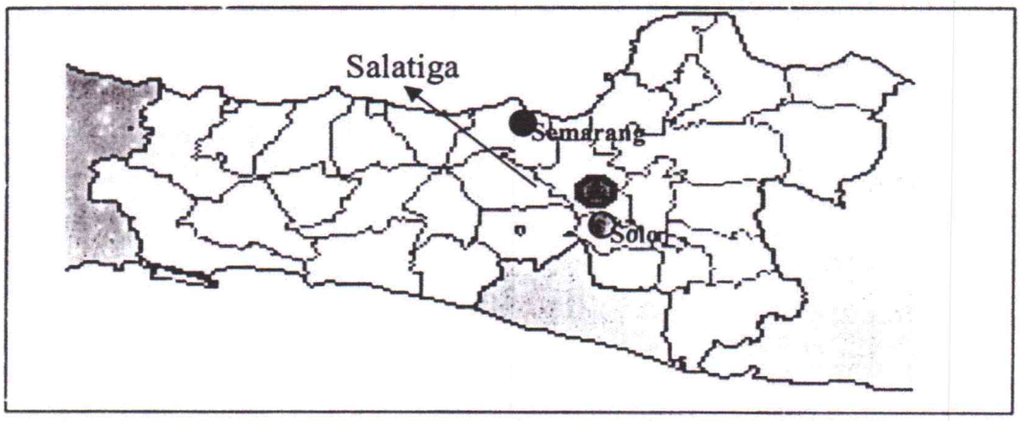
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Salatiga merupakan kota kecil yang mempunyai potensi luar biasa mengingat letak geografis dan kondisi demografisnya, sehingga Kota Salatiga mempunyai peran yang cukup penting sebagai indikator kondusifitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah



Kota Salatiga merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur (yang meliputi Kabupaten/Kota Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi). Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Untuk mendukung hal tersebut maka melalui Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal- Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara inter regional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari

wilayah barat dan timur Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Pulau Kalimantan. Secara Geografis Kota Salatiga terletak antara $007.17^{1}.17^{0}$ sampai $007.17^{1}.23^{0}$ Lintang Selatan serta antara $110.27^{1}.56,81^{0}$ sampai $110.32^{1}.4,64^{0}$ Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450- 825 dari permukaan laut dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang, dengan luas wilayah + 5.678,110 Hektar atau + 56,781 Km yang secara administratif dibagi menjadi 4 Kecamatan dan terdiri dari 23 Kelurahan dengan 1127 RT dan 206 RW. Secara Geografis Kota Salatiga letaknya strategis di antara Kota Semarang dan Kota Solo, yang dikelilingi oleh Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Pegunungan Gajah Mungkur, dan Gunung Ungaran, menjadikan kota ini sebagai kota transit perdagangan, kota transit pariwisata, kota pendidikan, dan kota olahraga. Sebagai kota yang terletak pada lintasan perdagangan JOGLOSEMAR (Jogya, Solo dan Semarang), Kota Salatiga menjadi kota yang demikian pesat kemajuannya dalam perdagangan. Hal ini ditunjang dengan dibangunnya pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Raya II, Pasar Jetis, Pasar Banyuputih. Pada akhir tahun 2023 penduduk Kota Salatiga berjumlah ± 201.369, dengan ditambah jumlah pendatang keluar masuk setiap hari baik berprofesi sebagai PNS, pedagang, buruh maupun siswa/mahasiswa dari luar kota, maka semakin terlihat aktivitas yang luar biasa pada pusat-pusat perdagangan. Kota Salatiga memiliki iklim sejuk karena terletak di kaki gunung Merbabu dengan ketinggian wilayah antara 450-825 m dpl dengan suhu + 230C–280C. Berdasarkan relief, Kota Salatiga terdiri dari 3 bagian yaitu daerah bergelombang sebanyak 9 kelurahan (+ 65%), daerah miring sebanyak 10 kelurahan (+ 25%) dan daerah datar sebanyak 4 kelurahan (+ 10%).

Kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat salah satunya dapat diukur dari kinerja pelayanan publik. RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2026, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045.

Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam Rencana Kerja, terdapat program-program yang dijadikan

pedoman perencanaan pembangunan. Program-program tersebut diperoleh dengan membandingkan kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan dari Pemerintah Kota Salatiga. Setelah itu, akan dihasilkan program-program prioritas yang akan dijadikan rencana pembangunan Kota Salatiga. Rencana Kerja harus mencerminkan prioritas nasional dan daerah, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), baik di level perangkat daerah maupun di tingkat kota.

Rencana Kerja tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Salatiga 2025-2045, RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 dan Perwali Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dalam RPJPN 2025-2045 visi, misi dan arah pembangunan nasional merupakan produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Visi Indonesia Emas 2045 adalah "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Secara umum visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan dengan kondisi terbaik dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan. Kemudian misi yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik adalah memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial, budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan Sumber Daya Alam. Pada aspek politik, Indonesia telah mewujudkan demokrasi substansial. System politik berjalan dengan Lembaga perwakilan, system pemilu dan partai politik yang mampu memperkuat system presidensial. Sebagai

landasan terwujudnya Indonesia Emas, 2045, ketahanan sosial, budaya dan ekologi dapat tercapai melalui kebijakan yang salah satunya diarahkan pada terwujudnya beragama maslahat, Kemudian arah tujuan pembangunan beragama maslahat dan berkebudayaan maju dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan baseline di tahun 2025 adalah 76,77 dan sasaran di tahun 2045 adalah 84,2.

Pada RPJMN 2025-2029, dengan visi Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik yang didukung oleh 320 Program Kerja. Misi Presiden yang dituangkan menjadi prioritas nasional yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik yaitu Asta Cita 1 yang menyebutkan bahwa memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Asta Cita 7 menyebutkan bahwa memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, kemudian Asta Cita 8 yang menyebutkan bahwa memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian di dalam konteks reformasi politik, terdapat 4 (empat) isu/tantangan dan peluang yaitu : biaya politik yang tinggi, pendanaan partai politik belum memadai, tata kelola partai politik belum memadai dan penyatuan pengaturan terkait pemilu dan pemilihan dalam satu buku yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam kontestasi electoral serta amanat MK yang final dan mengikat. Kemudian sasaran utamanya adalah terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan system anti korupsi dengan indikator Indeks Integritas Partai Politik dengan baseline di tahun 2025 adalah 52-57 dan target di tahun 2029 adalah 59-65.

Pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, terdapat 10 program prioritas Pj Gubernur Jawa Tengah. Kebijakan

pembangunan diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Program prioritas yang berkaitan dengan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik adalah program 2 yaitu menjaga stabilitas sosial, ekonomi politik, keamanan dan ketertiban. Adapun salah satu isu strategis adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat. Terdapat 8 misi untuk mendukung visi yang telah ditetapkan, salah satunya ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan highlight arah kebijakan transformasi di bidang tersebut adalah pengembangan kawasan strategis agrikultur Dieng-Serayu, Jratun seluna, dan Bengawan Solo Brantas dan Perlindungan pesisir utara Jawa dan konservasi lahan kritis di Jawa Tengah. Salah satu sasaran pokok yang ditetapkan adalah terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah yang kemudian diintegrasikan ke arah pembangunan ketentraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kota Salatiga sebagai kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang mendunia". Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Bergerak Kata "Bergerak" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna bahwa pembangunan Kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, mewujudkan kota yang produktif, sejahtera, harmonis dan berkemajuan, bergeraknya pembangunan Kota Salatiga secara adil dan merata
2. Energik "Energik" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna Kota Salatiga dapat mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menggerakkan kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan, karakter kerja, dan mewujudkan indeks pembangunan manusia yang tinggi, seiring dengan laju

pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada paradigma pembangunan yang inklusif - adil dan merata dengan optimalisasi sektor potensial perdagangan dan jasa, serta didukung sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, Usaha Mikro dan pariwisata.

3. Dinamis "Dinamis" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan keberadaan pemerintah kota yang mampu mengurus dan memecahkan setiap masalah yang timbul, dengan mengoptimalkan segala sumber daya pemerintahan yang dimiliki, dengan trus aktif mendayagunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik serta berjalannya prinsip kolaborasi pemerintahan Pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media), dalam mewujudkan pemerintahan kota yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
4. Adaptif "Adaptif" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan Pemerintah dan masyarakat Kota Salatiga yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, khususnya di tengah arus perubahan sosial, lingkungan dan distrupsi teknologi. Kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif. Perwujudan Kapasitas inovasi yang tinggi sebagai upaya memperkuat daya saing Kota Salatiga dalam interaksi sosial dan ekonomi di Tingkat nasional bahkan internasional Lingkungan hidup Kota Salatiga harus dibangun untuk mampu menjadi lahan bertumbuhnya insan- insan berkualitas, agile terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik adaptif karenanya juga ditanamkan khususnya pada pemuda, utamanya Generasi Z dan generasi milenial agar dapat mengembangkan diri serta berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah secara produktif dan berkelanjutan.
5. Salatiga yang Mendunia Salatiga Kota "mendunia" berarti

dikenal luas di seluruh dunia, atau menjadi salah satu kota yang berperan dalam interaksi hubungan internasional. Salatiga kota "mendunia" juga bisa merujuk pada sikap mental, perilaku, dan cara pandang pemerintah dan warga Kota Salatiga yang mencerminkan semakin luasnya pergaulan dan persaingan dunia. Pada saat yang sama, Kota Salatiga juga memiliki strategi pembangunan dan pemerintahan yang selaras dengan kondisi globalisasi di mana jarak ruang dan batas waktu antara satu komunitas dengan komunitas dunia lainnya juga semakin tidak berbatas (borderless). Pencapaian Visi Kota Salatiga "Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia" lima tahun ke depan ditetapkan dengan 13 (tiga belas) indikator sasaran utama visi daerah. Sasaran Visi dirumuskan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaian Visi RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029. Adapun indikator sasaran utama visi daerah untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagi tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Ketahanan Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Karakter.

RPJMD Kota Salatiga disusun mendasarkan pada amanat yang tertuang dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya RPJMD ditetapkan

dengan Peraturan Daerah (Perda) yang paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan bentuk komitmen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang menerjemahkan target pembangunan berkelanjutan jangka panjang dari RPJPD menjadi tahapan realistis dan terukur melalui visi dan misi Wali Kota.

Penyusunan RPJMD Kota Salatiga secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan RPJPD, serta memperhatikan RTRW Daerah lain. Penyusunan RPJMD yang berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya agar tercipta sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, dan keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya terutama yang berdekatan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan RPJMD meliputi 6 (enam) tahapan, yaitu : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perumusan rancangan akhir dan penetapan RPJMD. Kota Salatiga dalam menyusun RPJMD menggunakan pendekatan berorientasi proses meliputi teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down. Selain itu digunakan pula pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi: tematik-holistik, integratif dan spasial. Dalam hal ini kebijakan pembangunan diprioritaskan pada pelaksanaan tema tertentu yang bersifat menyeluruh mulai dari hulu

hingga hilir untuk suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki kedudukan yang strategis. RPJMD akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga RPJMD ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Salatiga setiap tahunnya.

Kota Salatiga dinobatkan menjadi Kota paling toleran se-Indonesia pada tahun 2025 oleh SETARA Institute Kota Salatiga melakukan inovasi progresif dalam pemajuan toleransi. Inovasi yang dihadirkan Kota Salatiga tahun ini berupa produk hukum promotif terhadap toleransi, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial. Hal ini sebagai salah satu indikator utama dalam menilai derajat toleransi. Pengukuran Indeks Kota Toleran (IKT) oleh SETARA Institute bertujuan mendorong kota-kota agar memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif dan kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, serta mengukur tingkat toleransi di berbagai kota di Indonesia. Salah satu upaya dalam mengatasi intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama /berkeyakinan yang rendah. Sebagai upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial. Pengukuran IKT

menggabungkan paradigma hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional.

Berkaitan dengan paskibraka, dimana purna paskibraka ditugaskan menjadi Duta Pancasila, sangatlah penting berperan sebagai agen perubahan dan teladan bagi generasi muda, khususnya dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila di masyarakat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan disiplin, tanggungjawab, serta semangat gotong royong dan bela negara. Purna paskibraka menjadi jembatan penghubung antara generasi muda dengan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanggulangan Ekstrimisme (RAD PE) adalah rencana aksi yang dibuat di tingkat daerah sebagai bagian dari upaya pencegahan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. RAD PE selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme (RAN PE) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari ancaman terorisme berbasis kekerasan serta menciptakan rasa aman, damai dan perlindungan warga negara di daerah sebagaimana dimanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga tahun 2026 diselaraskan dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan

ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.2. DASAR HUKUM

Sebagai landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupatan/Kota Layak Anak;
9. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (diletakkan sesudah Instruksi Presiden);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
24. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 adalah :

A. Maksud

1) Memberikan perubahan arah dan landasan penyusunan

kebijakan kinerja bagi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;

2) Sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target - target kinerja;

3) Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi misi Kota Salatiga yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4) Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

5) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah.

B. Tujuan

1) Sebagai rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;

2) Memudahkan jajaran pejabat struktural dalam memahami, menilai dan menetapkan arah kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas;

3) Tersedianya dokumen dan acuan resmi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga serta sebagai dasar menentukan prioritas dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2026;

4) Menyediakan informasi dalam pemenuhan laporan evaluasi dan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dengan mengacu pada realisasi tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026 dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD disajikan dalam tabel 1 (Tabel E.81). Sedangkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja disajikan dalam tabel 2 (tabel e.70).

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dalam

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 8.126.480.267,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.682.600.128,- atau 57,62%, dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah masih 0%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai 51%
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mencapai 98,62%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 39,16%
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 25,8%
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 27,71%
7. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mencapai 8,03%
8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik mencapai 97,3%
9. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencapai 97,85%
10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mencapai 6,76%
11. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial mencapai 86,85%

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga

Periode Pelaksanaan : Tahun 2026

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Indikator : Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, target : 1,7
2. Indikator : Terselesaikannya kasus Konflik Horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya, maupun politik, target : 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2026 yang dievaluasi (Anggaran pergeseran/ penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 202	
										I		II											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)						(12)		(13)=(6)+(12)		(14)=(13)/(5)x100 %	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**85**	**8.456.269.220**	**171,56**	**11.496.447.317**	**85**	5.427.780.000		**1.589.571.056**		**1.382.577.833**					0	2.972.148.889	**171,6**	**14.468.596.206**		
1.1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	11.449.262	179,66	13.987.600	100	15.000.000		**0**		**0**					0	0	**179,7**	**14.943.100**		
1.1.1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	11.449.262	18,00	4.051.800	8	5.828.000		0		0					0	0	0	4.051.800		
1.2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**4.865.000.000**	**184,43**	**8.843.160.952**	**100**	**4.869.280.000**		**1.250.903.854**		**1.159.408.379**					**0**	**2.410.312.233**	**184,4**	**11.253.473.185**	**184,4**	**231,31%**
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35	7.149.507.853	62,00	4.254.649.269	35	4.536.185.322		1.167.596.873		2.321.644.767					0	2.321.644.767	62	6.576.294.036	177,1	**230,23%**
1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	29.516.256	2,00	18.960.000	1	98.552.324		16.730.098		42.106.988					0	42.106.988	2	77.797086	200	**305,84%**
1.3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100**	**18.000.000**	**200,00**	**54.431.275**	**100**	**18.000.000**		**28.500.000**		**0**					**0**	**28.500.000**	**200**	**83.181.275**	**200**	**166,3%**
1.3.1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	29.000.000	3,00	28.750.000	1	28.900.000		28.500.000		0					0	28.500.000	3	57.250.000	300	**114,5%**

1.4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**287.000.000**	**200,00**	**1.243.774.657**	**100**	**284.500.000**		**98.497.300**		**151.849.480**					**0**	**151.849.480**	**200**	1.395.624.137	**200**	**279%**
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	19.524.872	2,00	17.266.000	1	9.903.750		0		5.747.000					0	5.747.000	2	23.013.000	200	**744,74%**
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1		4,00	4.000.000	1	2.500.000		0		0						0		4.000.000		**1096,69%**
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	26.938.708		11.267.200	1	18.399.500		0		8.809.850					0	8.809.850	0	20.077.050	0	**113,28%**
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4	109.807.500	13,00	56.339.600	4	59.431.150		4.219.959		22.980.354					0	27.200.313	13	85.547.618	325	**275,52%**
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	12.000.000	4,00	15.906.900	2	14.580.200		0		3.506.300					0	3.506.300	4	19.413.200	200	**383,83%**
1.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1.625.151	2,00	1.040.000	1	1.560.000		280.000		780.000					0	1.060.000	2	2.100.000	200	**186,67%**
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	292.928.636	2,00	277.669.534	1	100.087.000		17.425.890		38.055.890					0	55.481.700	2	333.151.234	200	**588,11%**
1.5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**80.625.500**	**100,00**	**345.962.500**	**100**	**35.000.000**		**147.585.000**		**0**					**0**	**147.585.000**	**100**	**493.547.500**	**100**	**1096,77%**
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	80.625.500	12,00	179.285.000	6	35.000.000		147.585.000		0					0	147.585.000	12	326.870.000	200	**1096,77%**
1.6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**61.000.000**	**197,19**	**247.155.328**	**100**	**61.000.000**		**27.938.602**		**58.519.774**					**0**	**86.458.376**	**197,2**	**333.613.704**	**197,2**	**546,91%**
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1	1.610.510	2,00	900.000	1	1.521.000		1.300.000		0					0	1.300.000	2	2.200.000	200	**290,00%**
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	29.676.376	3,00	33.889.729	1	45.668.000		9.927.068		20.136.960					0	30.064.028	3	63.953.757	300	**456,80%**
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	320.611.546	2,00	184.560.286	1	120.687.676		11.227.068		43.306.963					0	54.534.031	2	239.094.317	200	**576,03%**
1.7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**161.000.000**	**200,00**	**747.975.005**	**1**	**145.000.000**		**34.940.800**		**12.800.200**					**0**	**47.741.000**	**200**	**795.716.005**	**200**	**494,23%**
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	225.471.400	14,00	254.135.960	1	145.932.200		22.445.300		46.145.600					0	46.145.600	14	308.281.560	233,3	**314,84%**
1.7.2		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	0	0,00	0	100	0	0	0							0	0	0	0	0	**0,00%**
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	40.262.750	3,00	33.405.000	6	28.540.000		4.960.000		2.195.000					0	7.155.000	3	40.460.000	75	**253,61%**

1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	59.895.000	2,00	95.555.460	1	0	0	0		0					0	0	2	95.555.460	200	1715,39%
2	**Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila**	**75**	**202.000.000**	**83,77**	**1.592.533.400**	70	**201.500.000**		**26.465.000**		**45.146.500**					0	71.611.500	**83,77**	**1.664.144.900**	**111,7**	**823,83%**
2.1		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**	**400**	**115.000.000**	**370,00**	**874.678.800**	400	115.000.000		**26.465.000**		**45.146.500**					0	71.611.500	**370**	**946.290.300**	**92,5**	**822,86%**
2.1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	200	178.585.665	190,00	670.379.675	200	7.304.000		800.000		2.400.000					0	3.200.000	190	673.579.675	95	**274,15%**
2.1.2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan																				
2.1.3		Pembentukan Paskibraka		0	962.796.691	0	651.665.375	0	678.095.933		0		52.644.200						52.644.200		704.309.575		**#DIV/0!**
3	**Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan**	**100**		**100,00**	**20.333.415.700**	**100,00**	**761.043.964**		**32.128.400**		**14.740.000**					**0**	**46.868.400**	**100**	**20.380.284.100**	**100**	**2677,94%**
3.1		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,**	**Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan**	**11**	**712.769.308**	**3,00**	**20.333.415.700**	**11**	**761.043.964**		**32.128.400**		**0**					**0**	**32.128.400**	**3**	**20.365.544.100**	**27,27**	**2676,00%**

		serta Pemantauan Situasi																				

3.1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																			
3.1.2		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	200	82.000.000	100,00	67.401.900	200	18.875.000		300.000		600.000				0	900.000	100	68.301.900	50	**763,09%**
3.1.3		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8	14.848.317	7,00	11.692.700	8	720.138.216		0		718.488.216				0	718.488.216	7	730.180.915	87,5	**145,16%**
4	**Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan**	**47,5**	**1.096.925.408**	**62,16**	**2.876.731.300**	45	**1.098.906.036**		**6.856.600**		**1.402.775.000**				0	1.409.631.600	**62,16**	**4.286.362.900**	**130,9**	**390,76%**
4.1		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Ormas yang terfasilitasi**	**15**	1.924.868.267	**12,00**	**2.876.731.300**	15	**1.098.906.036**		**6.856.600**		**1.402.775.000**				0	1.409.631.600	**12**	**4.286.362.900**	**80**	**390,76%**
4.1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	80	1.884.497.774	100,00	1.400.000.000	70	1.294.160.000		0		1.271.560.000				0	1.271.560.000	100	2.671.560.000	125	**424,39%**

4.1.2		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	16.945.493	2,00	14.315.200	2	7.176.000		1.480.000		1.798.000					0	3.269.000	2	17.584.200	100	175,92%
5	**Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**persentase penurunan penyalahgunaan narkoba**	**10**	**342.200.000**	**0,00**	**280.965.500**	**45**	**342.200.000**		**2.900.000**		**-2.900.000**					**0**	**0**	**0**	**280.965.500**	**0**	**82,11%**
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	**56**		**77,90**		**54**															
5.1		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	**Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba**	**28**	**342.200.000**	**56,00**	**280.965.500**	**30**			**2.900.000**		**0**					**0**	**0**	**77,9**	**0**		
5.1.1		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika,fasilitasi Kerukunan Umat	2	264.978.121	2,00	179.522.800	2	109.679.996		0		6.870.000					0	6.870.000	**2**	**186.392.800**	100	**44,59%**
5.1.2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	11.000.000	2,00	183.787.400	2	1.820.000	0	666.000		666.000					0	1.332.000	**2**	**185.119.400**	100	**-2,69%**
6	**Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial**	**50**	**805.980.628**	**16,00**	**1.270.855.500**	**35**	**789.000.000**		**84.810.000**		**181.435.500**					**0**	**266.245.500**	**16**	**1.537.101.000**	**32**	**190,71%**
6.1		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun**	**7**	**975.134.008**	**8,00**	**1.270.855.500**	**8**	**789.000.000**		**84.810.000**		**181.435.500**					**0**	**266.245.500**	**8**	**1.537.101.000**	**114,3**	**190,71%**

6.1.1		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	357.960.450	1,00	291.223.920	1	13.660.000		0		13.510.000					0	13.510.000	1	304.733.920	100	**203,53%**
6.1.2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2	62.575.722	2,00	37.218.700	2	11.640.000		0		5.610.000					0	5.610.000	2	42.828.700	100	**145,35%**
6.1.3		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70																		
6.1.4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	32	176.848.493	67,00	164.592.710	32	35.770.000		39.800.000		33.910.000					0	73.710.000	67	238.302.710	209,4	**185,03%**

6.1.5		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	28.995.944	1,00	26.040.840	1	5.025.000		0		4.865.000					0	4.865.000	1	30.905.840	100	**174,12%**
6.1.6		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	254.753.399	12,00	129.579.900	12	7.360.000		0		5.890.000					0	5.890.000	12	135.469.900	100	**89,15%**
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
	Predikat Kinerja																								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																								
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																								
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)																								
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																								

Selanjutnya akan disajikan data pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga

Tabel E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja

Perangkat Daerah Kota Salatiga

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaiaan		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
5	Penetuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaiakan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran Wali Kota	√			

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaiaan		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang disyahkan	√			

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis dengan Pelayanan

   Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dalam kurun waktu perencanaan sebelumnya menunjukkan capaian yang cukup baik, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang harus diantisipasi/ hal kritis dalam rencana kerja mendatang, khususnya yang berkaitan dengan kualitas layanan publik.

   Hal-hal kritis yang perlu menjadi perhatian dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga antara lain:

   a. Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan

      Masih terdapat keterbatasan terhadap validasi keberadaaan dan aktivitas ormas yang belum sepenuhnya akurat, pengawasan terhadap aktivitas oermas yang berpotensi konflik masih lemah

   b. Ketersediaan dan efektifitas data deteksi dini dan cegah dini

      Masih diperlukan kapasitas SDM dalam analisis risiko sosial-politik, peningkatan sistem monitoring sosial Politik.

   c. Pembinaan Politik Masyarakat

      Belum Optimalnya edukasi politik yang efektif menjelang pemilu masih menjadi tantangan, kesenjangan literasi politik antara kelompok tua dan muda

   d. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pelayanan Hibah

      Belum Optimalnya Fasilitasi Kerukunan umat Beragama karena dinamika sosial masyarakat multikultural yang memerlukan perhatian ekstra, keterbatasan anggaran yang mempengaruhi intensitas kegiatan dialog lintas agama sedangkan untuk hibah diperlukan peningkatan sistem pelayanan online agar lebih transparan dan cepat.

   e. Kualitas Pelayanan Bidang Ideologi

      Masih minimnya inovasi metode edukasi ideologi Pancasila bagi generasi muda

2. Permasalahan dan Hambatan

   Dalam Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan

menetapkan skala prioritas permasalahan yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

Adapun yang menjadi permasalahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan
b. Belum optimalnya Pembinaan Pendidikan dan literasi Politik di Masyarakat
c. Belum optimalnya pembinaan dan Pengawasan Ormas
d. Belum optimalnya sistem deteksi dini dan cegah dini potensi ATHG (Ancaman,Tantangan, Hambatan dan Gangguan)
e. Minimnya Forum Dialog reguler antar tokoh lintas agama
f. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan Internal PD

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, atau tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah terhadap capaian program

Apabila permasalahan serta hal-hal kritis terkait urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik belum dapat diselesaikan, hal-hal ini dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029, khususnya dalam menunjang misi kedua "Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM", serta pencapaian sasaran pembangunan daerah yang kedua "Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan".

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dalam urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga adalah :

a. Perubahan Moral dan Karakter pada masyarakat utamanaya generasi muda karena pengaruh budaya global
b. Meningkatnya potensi radikalisme dan perkembangan isu politik yang mempengaruhi kondisi daerah
c. Keterbatasan teknologi untuk memantau dinamika sosial secara real time
d. Tingkat literasi politik masyarakat masih rendah

Peluang dalam urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga adalah :

a. Adanya Kemajuan Teknologi Informasi seperti pemanfaatan konten digital untuk pembinaan Wawasan Kebangsaan dan literasi politik
b. Partisipasi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjaga kondusivitas dan toleransi
c. Kerjasama Multi stakholder kolaborasi TNI/POLRI, Bawaslu dan KPU serta Ormas

5. Isu Penting

Berdasarkan dari permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat disimpulkan menjadi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga yaitu :

a. Penguatan Ideologi dan karakter Kebangsaan yang adaptif
b. Penguatan literasi politik masyarakat dan stabilitas politik
c. Penguatan pembinaan dan pengawasan ormas
d. Peningkatan sistem deteksi dini dan cegah dini ATHG
e. Penguatan harmonisasi antar umat beragama
f. Penguatan kapasitas kelembagaan

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

Kegiatan membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Kegiatan ini bertujuan memberikan kejelasan arah kebijakan perencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Adapun telaahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan dari

Perubahan Rencana Kerja terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan Rencana Kerja berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program dan kegiatan yang diusulkan dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renja Tahun 2026.

Kegiatan ini adalah proses review membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Kegiatan ini bertujuan memberikan kejelasan arah kebijakan perencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Adapun telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian terget dan tingkat kinerja yang dicapai. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan dari Rencana Kerja terhadap hasil Analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Kerja berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program dan kegiatan yang diusulkan dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renja Tahun 2026.

Review terhadap RKPD Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Ranwal 2026 memiliki indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 84,75% dan pada analisis kebutuhan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 86,13%, prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan 100% dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 68.7. Indikator kinerja berubah karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi pemutakhiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Ranwal 2026 memiliki indikator kinerja Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebesar 70% dan pada analisis kebutuhan memiliki indikator kinerja Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 5%. Indikator kinerja berubah karena Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya Politik pada Ranwal 2026 memiliki indikator kinerja Persentase Pendidikan Politik yang dilaksanakan sebesar 100% dan pada analisis kebutuhan memiliki indikator kinerja Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 55%. Indikator kinerja berubah karena Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Ranwal 2026 memiliki indikator

kinerja Jumlah Ormas yang terfasilitasi sebesar 45% dan pada analisis kebutuhan memiliki indikator kinerja Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif sebesar 60%. Indikator kinerja berubah karena Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Ranwal 2026 memiliki indikator kinerja persentase penurunan penyalahgunaan narkoba sebesar 8% dan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 54 dan pada analisis kebutuhan memiliki indikator kinerja Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, social, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan sebessar 80%. Indikator kinerja berubah karena Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial pada Ranwal 2026 memiliki indikator kinerja Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial sebesar 35% dan pada analisis kebutuhan memiliki indikator kinerja Persentase Penyelesaian Konflik sebesar 100%.

Setelah proses membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, kemudian disusun catatan-catatan penting terhadap perbedaan. Berikut perbedaan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD antara lain :

1. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2. Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
3. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Review terhadap RKPD Tahun 2026

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
					8.992.616.000					**10.627.034.945**	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	6.126.314.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	86,13	6.572.911.923	Indikator kinerja berubah karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
								Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100		
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,7		

I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Prosentase Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	7.820.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3	7.820.000	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
							Kota Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8		
							Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	10	7.820.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	3.000.000	

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	2.820.000	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3	2.000.000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	5.370.158.900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	5.717.341.109	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	5.349.998.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	5.697.181.109	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	20.160.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	20.160.000	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	2.820.000	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3	2.000.000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	5.370.158.900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33	5.717.341.109	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	5.349.998.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	5.697.181.109	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	20.160.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	20.160.000	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100	28.900.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	29.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	28.900.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	29.000.000	
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	314.795.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	326.919.450	
							Kota Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		
							Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		
							Kota Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		
							Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
							Kota Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		
							Kota Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13.335.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	13.335.750	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	18.399.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	18.399.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	66.846.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	75.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	14.580.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.110.000	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	9.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	200.074.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	200.074.200	
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	55.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	55.000.000	
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	226.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	240.331.364	
							Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
							Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.100.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	20.269.364	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	195.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	218.962.000	
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	178.540.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	196.500.000	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
							Kota Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		
							Kota Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		
							Kota Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	154.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	0	Pemeliharaan Mebel	Kota Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	15.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	28.540.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	27.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Salatiga	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila	75	740.454.400	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Salatiga	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	5	910.913.276	Indikator kinerja berubah karena Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Salatiga	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	400	740.454.400	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	2	910.913.276	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
							Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	100		
							Kota Salatiga	Jumlah Paskibraka (Orang)	83		
							Kota Salatiga	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
							Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	100		
							Kota Salatiga	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)			
							Kota Salatiga	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	0		

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200	38.411.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	138.411.500	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	0	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	0	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	2	0	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Salatiga	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	0	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Salatiga	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	0	
	Pembentukan Paskibraka	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Paskibraka	0	702.042.900	Pembentukan Paskibraka	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Paskibraka	83	772.501.776	
						Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Salatiga	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	0	0	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Salatiga	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	100	111.820.700	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Salatiga	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	55	766.287.965	Indikator kinerja berubah karena Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor : 900/42/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bantuan Keuangan untuk Partai Politik)

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
III.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Salatiga	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan	11	111.820.700	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	50	766.287.965	
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2		

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50	676.146.365	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200	101.679.100	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	80.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8	10.141.600	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2	10.141.600	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Salatiga	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	47,5	1.354.181.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Salatiga	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	47,5	1.501.599.252	Indikator kinerja berubah karena Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
IV.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Salatiga	Jumlah Ormas yang terfasilitasi	15	1.354.181.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	60	1.501.599.252	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	2		
								Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2		

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	16.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80	1.342.610.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60	1.474.025.252	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	11.571.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	11.574.000	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Salatiga	Indeks Kerukunan Umat Beragama	56	118.633.400	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Salatiga	Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi , sosial,budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	80	109.276.153	Indikator kinerja berubah karena Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Bidang Rehabilitasi (Pengadaan alat test narkoba bagi ASN, TNI, POLRI dan masyarakat) dan menindaklanjuti Perda Nomor 7 Tahun 2025, tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029, dimana untuk mendukung visi Wali Kota Salatiga yang salah satu Indikator Kinerjanya adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dalam penghitungannya membutuhkan penilaian dari lembaga yang memiliki kredibilitas (Jasa konsultan untuk penghitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama)

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
V.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Salatiga	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	28	118.633.400	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Salatiga	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	109.276.153	
								Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2		

RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika,fasilitasi Kerukunan Umat	2	114.293.400	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	102.276.153	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	4.340.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	7.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
VII	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Salatiga	Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	50	541.211.800	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Salatiga	Persentase Penyelesaian Konflik (Persentase)	100	766.046.376	Indikator kinerja berubah karena Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan menindaklanjuti hasil rapat Kominda dan Jam Pimpinan yang diselenggarakan di Polres Salatiga pada tanggal 20 Agustus 2025 dimana salah satu usulannya adalah meningkatkan kesejahteraan intelijen (Honor Tim Cipta Kondusivitas Daerah, Tim Penanganan Konflik Sosial, Honor (FKDM) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Honor Tim (POA) Pengawasan Orang Asing

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
VII.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Salatiga	Jumlah Potensi Konflik dalam satu tahun	7	541.211.800	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		766.046.376	
							Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		
							Kota Salatiga	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
							Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1		
							Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	1		

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
							Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	32		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	289.567.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	338.711.796	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2	27.630.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	42.740.060	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32	70.000.000	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32	120.840.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32	120.789.900	

No.	RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribu)	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	29.370.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	19.804.820	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	73.804.800	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	173.999.800	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 terdiri atas 6 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Rencana Kerja ini mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas dengan alokasi belanja operasi terdiri dari :

- belanja pegawai sebesar Rp 4.536.185.322,00
- belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.581.748.729,00
- belanja hibah sebesar Rp 2.008.548.216,00
- pagu keseluruhan sebesar Rp 8.126.480.267,00

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga periode Tahun 2026 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sedangkan keluaran sub kegiatan disesuaikan dengan visi, misi, strategi dan tujuan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Renstra yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      i. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
ii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
iv. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
v. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik
iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
iv. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
v. Penyediaan Jasa
vi. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

i. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
ii. Pembentukan Paskibraka

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

i. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

ii. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

i. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

ii. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

i. Penyusunan Program Kerja di Bidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

ii. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

i. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

ii. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang

Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

iii. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemanatuan Orang Asing, Tenaga kerja asig, dan lembaga asing,kewaspdaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di DaerahPelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

iv. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

v. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
vi. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

3.1 Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan 2026

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tematik pembangunan daerah melalui penguatan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, ketahanan sosial dan politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang mendorong terciptanya stabilitas daerah, peningkatan kerukunan dan toleransi masyarakat, penguatan pendidikan politik dan kesadaran berdemokrasi, serta pencegahan konflik sosial dan potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai upaya penguatan kerukunan sosial, agama, ras, maupun kelompok masyarakat mencakup peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk memperkuat cinta tanah air, toleransi, dan sikap saling menghormati, dapat dilakukan melalui:

- penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- pembinaan ketahanan sosial dan budaya;
- peningkatan kewaspadaan nasional;
- fasilitasi penanganan konflik sosial.

Melalui pelaksanaan rencana kerja tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam menciptakan kondisi sosial-politik yang kondusif sebagai fondasi bagi keberhasilan pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di samping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi juga ada beberapa pertimbangan lain, yaitu

antara lain pengentasan kemiskinan, Pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung kebijakan tematik pada sektor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dukungan program dan kegiatan terhadap kebijakan tematik diwujudkan melalui Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila, Peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat,Pencegahan dan Penanganan potensi ATHG (ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) dan Fasilitasi Kerukunan Antar Umat Beragama/Ras/Suku/Budaya dan Pembinaan Ormas atau dapat dilihat di tabel berikut ini:

Dukungan Program dan Kegiatan terhadap kebijakan Tematik

No	Jenis Kebijakan Tematik	Program	Aktivitas
1	Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penananganan konflik sosial	Pembinaan FKDM
			Penyusunan Laporan potensi ATHG
			Koordinasi Penanganan Konflik sosial
			Rapat Koordinasi Intelejen Daerah
			Pengamanan Hari Besar Agama

a. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN)

Pedoman dalam menelaah adalah RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Salatiga 2025-2045, RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025- 2029, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 dan Perwali Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Analisis ini melibatkan peninjauan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah untuk kemudian dirumuskan menjadi program dan kegiatan yang terintegrasi, sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah. Tujuan akan

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Berdasarkan RPJPN 2025-2045, kebijakan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik berfokus pada kebijakan ke-1 yaitu Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia dan kebijakan ke-2 yaitu Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Kemudian visi misi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi misi presiden. Visi : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas dan Misi : Asta Cita sebagai Prioritas Nasional. Arah kebijakan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik adalah asta cita ke-1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), asta cita ke-7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Kemudian asta cita ke-8 yaitu Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Selanjutnya berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, misi yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik adalah Misi ke-5 : menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan mengedepankan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan beribadah, perlindungan kesejahteraan sosial, dan hak asasi manusia yang berkeadilan. Misi ini bertujuan menciptakan kondisi sosial dan politik yang stabil, harmonis, dan aman bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Kemudian berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, misi yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik adalah adalah misi ke-5 yaitu Kemantapan birokrasi yang berintegritas dan peningkatan kondusivitas wilayah. Misi ini bertujuan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas

dan dinamis, serta meningkatkan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial.

Dukungan program prioritas Kota Salatiga terhadap program prioritas Provinsi Jawa Tengah sangat penting untuk menciptakan sinergi dan kesinambungan pembangunan antar tingkat pemerintahan. Ketika Pemerintah Kota Salatiga menyelaraskan program prioritasnya dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah, maka akan tercipta harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Hal ini mempermudah koordinasi antar wilayah, menghindari duplikasi program, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan pembangunan bersama yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

b. Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Salatiga

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 mendukung prioritas pembangunan daerah melalui penguatan kondisi sosial, politik, dan kemasyarakatan yang kondusif sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan pendidikan politik dan budaya demokrasi, pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan, pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, toleransi, partisipasi masyarakat, kerukunan sosial, serta stabilitas daerah, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang aman, harmonis, demokratis, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026.

Perangkat Daerah menetapkan Program dukungan terhadap prioritas pembangunan Kota yang merupakan program kegiatan yang disusun pada OPD mengacu pada prioritas program pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik terhadap Prioritas Kota diwujudkan melalui program-program yang memperkuat stabilitas sosial-politik, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan Organisasi Masyarakat, memperkokoh ideologi Pancasila serta menjaga kerukunan dan ketahanan Masyarakat adapun pada tabel tersaji dibawah ini:

Dukungan program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Kota

No	Prioritas	Program	Aktivitas
1	meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Sosialisasi wawasan kebangsaan untuk masyarakat
			Pembentukan Paskibraka
			Pembentukan Purnapaskibraka
3		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penananganan konflik sosial	Optimalisasi Kewaspadaan dini dan cegah dini daerah dalam menjaga stabilitas
4			Orientasi kewaspadaan nasional pencegahan extrimisme dan radikalisme

c. Dukungan terhadap SDG's

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang damai, inklusif, demokratis, serta didukung oleh kelembagaan yang efektif dan akuntabel. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, peningkatan kewaspadaan dini dan pencegahan konflik sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, penguatan kerukunan antarumat beragama, pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Pelaksanaan program tersebut sejalan terutama dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan

yang Tangguh) serta berkontribusi terhadap SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Dengan demikian, Kesbangpol berkontribusi dalam menciptakan kondisi sosial dan politik yang kondusif sebagai fondasi bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

fokus utama pada:

1. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
2. Peningkatan kewaspadaan dini dan pencegahan konflik sosial
3. Penguatan kerukunan umat beragama
4. Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan
6. Pencegahan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme
7. Penguatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat sipil
8. Penguatan kesetaraan dan inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat

3.2 Rencana Kerja Dukungan Pencapaian IKU dan IKK

Target kinerja indikator bidang urusan meliputi indikator utama Tahun 2026 yang didasarkan pada Renstra PD Tahun 2025 s.d. 2029 dan evaluasi hasil renja PD Tahun 2025 terdiri dari 3 indikator serta target kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Keterangan
			2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	79	79,2	79,4	79,6	79,8	80	80	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik}}{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran}} \times 100\%$
2	Persentase cakupan Pendidikan politik untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyelesaian Potensi ATHG (Ancaman, Tantangan Hambatan dan	%	100	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah potensi ATHG yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi ATHG yang teridentifikasi}} \times 100\%$

	Gangguan) bidang Ideologi,Politik, Sosial, Budaya,Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM)									

Selain itu Perangkat Daerah juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara urusan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah, untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci, akan tetapi terdapat Indikator Kinerja Kunci untuk instrumen data Tambahan EPPD urusan Pemerintahan Umum yaitu Jumlah Penanganan Konfllik Tahun n.

Inovasi Bidang Urusan dalam Upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat

Kota Salatiga secara historis merupakan mozaik keberagaman Indonesia yang paling autentik. Predikat sebagai salah satu "Kota Paling Toleran" bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan sebuah warisan sosial yang harus dirawat secara berkelanjutan. Namun, di tengah gempuran era digital, tantangan yang dihadapi generasi muda (Gen-Z dan Gen-Alpha) di sekolah kini mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Tantangan tersebut antara lain Polarisasi digital, normalisasi perundungan (*bullying*), dan ancaman destruktif narkotika yang kini masuk melalui celah rasa ingin tahu remaja.

Kita tidak bisa lagi menggunakan metode sosialisasi konvensional yang kaku dan satu arah. Generasi hari ini membutuhkan narasi yang relevan dengan dunia mereka. Oleh karena itu, hadirnya konsep "*Kesbangpol Goes to School*" dengan semangat "Salatiga Beda" (Berani Edukasi Dalam Adaptasi) bertujuan untuk membedah makna keberagaman dari sudut pandang yang lebih segar. Kita ingin menggeser paradigma siswa: bahwa menjadi "Beda" bukan berarti menjadi asing, melainkan menjadi istimewa.

Melalui intervensi singkat namun intensif selama 10 menit pasca

upacara bendera, Badan Kesbangpol hadir untuk menjemput bola, menjadikan Badan Kesbangpol sebagai mitra strategis sekolah dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan siswa secara berkelanjutan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk:

a. Membentengi siswa dari pengaruh paham ekstrem, bahaya narkotika, serta perilaku perundungan melalui penguatan jati diri sebagai anak Salatiga;
b. Meningkatkan literasi politik bagi pemilih pemula dan pemahaman ideologi Pancasila secara aplikatif;
c. Mengukuhkan identitas "Salatiga Beda" sebagai kebanggaan lokal pelajar.

Sasaran kegiatan ini dirancang secara inklusif untuk menjangkau seluruh ekosistem pendidikan di Kota Salatiga, yang meliputi:

1. **Pelajar SD:** Fokus pada pembentukan karakter dasar dan pengenalan kasih sayang dalam perbedaan.
2. **Pelajar SMP:** Fokus pada pertahanan diri dari pengaruh pergaulan negatif dan budaya *bullying*.
3. **Pelajar SMA/**SMK**/MA:** Fokus pada kesiapan sebagai pemilih pemula, wawasan kebangsaan strategis, dan pencegahan radikalisme/narkoba.

Agar kegiatan tepat sasaran dan efisien dalam durasi 10 menit, ruang lingkup "Kesbangpol Goes to School" dibatasi pada hal-hal berikut:

1. **Lingkup Wilayah:** Seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta di wilayah administratif Kota Salatiga (Kecamatan Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, dan Sidorejo).
2. **Lingkup Operasional:**
   a. Aksi Lapangan: Pelaksanaan sosialisasi intensif 10 menit pasca upacara bendera
   b. Dialog : Tanya jawab interaktif berbasis kuis untuk mengukur pemahaman siswa
3. **Lingkup Materi (Materi Inti):**

Setiap kunjungan akan membawa satu dari tujuh materi inti secara bergantian:

a. Wawasan Kebangsaan (Nasionalisme kekinian)
b. Anti-Bullying (etika pergaulan dan empati)
c. Penyalahgunaan Narkoba (gaya hidup sehat dan berprestasi)
d. Pendidikan Politik (demokrasi bagi pemilih pemula)
e. Toleransi (merayakan keberagaman Salatiga)

f. Teknis dan Filosofi Paskibraka (kedisplinan dan kepemimpinan)
g. Pancasila (Ideologi sebagai sistem operasi kehidupan

Pagu indikatif pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD disebabkan oleh adanya penyesuaian prioritas anggaran berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan perubahan kebutuhan program/kegiatan yang muncul setelah Rancangan Awal RKPD disusun.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melalui Nota Dinas secara resmi telah disetujui. Keputusan ini diambil setelah TAPD melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap efektivitas serta urgensi kebutuhan program yang diajukan. Dengan disetujuinya usulan tersebut, alokasi anggaran tambahan ini diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan keuangan daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, serta program kerja prioritas Kesbangpol dalam menjaga stabilitas politik dan ketenteraman masyarakat. Ringkasan anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kesbangpol Rp. 8.126.480.267,- pada penetapan, dengan Rincian:

- belanja pegawai sebesar Rp 4.536.185.322,00
- belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.581.746.729,00
- belanja hibah sebesar Rp 2.008.548.216,00
- pagu keseluruhan sebesar Rp 8.126.480.267,00

dengan adanya penambahan anggaran yang disetujui, berikut ringkasan anggaran perubahan 2026:

- belanja pegawai sebesar Rp 4.536.185.322,00
- belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.007.660.829,00
- belanja hibah sebesar Rp 1.986.548.216,00
- belanja modal peralatan dan mesin Rp. 89.995.900,00

- pagu keseluruhan sebesar Rp 8.620.390.267,00

Hasil dari Rapat Pembahasan antar Badan Anggaran DPRD dengan TAPD terhadap Rancangan KUA PPAS TA 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 60. 000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah) sebagai pendukung Kegiatan, pada:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; pada Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka, dengan anggaran Rp. 20.000.000,-

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; pada sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan anggaran Rp. 40.000.000,-

Ringkasan akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dengan Pagu keseluruhan Rp. 8.680.390.267,00

- belanja pegawai sebesar Rp 4.536.185.322,00
- belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.067.660.829,00
- belanja hibah sebesar Rp 1.986.548.216,00
- belanja modal peralatan dan mesin Rp. 89.995.900,00

Rumusan Rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif ditampilkan pada tabel sebagaimana terlampir.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SALATIGA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.0.00.0.00.32.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							8.992.616.000,00	8.126.480.267,00	8.620.390.267,00	-372.225.733,00							11.228.779.650,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.992.616.000,00	8.126.480.267,00	8.620.390.267,00	-372.225.733,00							11.228.779.650,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.992.616.000,00	8.126.480.267,00	8.620.390.267,00	-372.225.733,00							11.228.779.650,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan				100 68,7 86,13 % Nilai Nilai 85 % 85 Skor	85 % 85 Skor 85 Skor 86,13 100 68,7 Nilai % Nilai	6.126.314.700,00	5.215.776.122,00	5.391.787.422,00	-734.527.278,00					Kota Salatiga		7.546.613.236,00	

			Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Nilai SAKIP Perangkat Daerah																	
		[Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***87.25***	***85.49***	***85***			***6.126.314.700,00***	***5.215.776.122,00***	***5.391.787.422,00***	***-734.527.278,00***						***85.93***	***7.546.613.236,00***	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.820.000,00	5.828.000,00	5.828.000,00	-1.992.000,00							8.602.000,00	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				8 Laporan	8 Laporan	7.820.000,00	5.828.000,00	5.828.000,00	-1.992.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			8.602.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat				100 %	100 %	5.370.158.900,00	4.634.737.646,00	4.640.297.646,00	-729.861.254,00							6.620.160.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.349.998.900,00	4.536.185.322,00	4.536.185.322,00	-813.813.578,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan			6.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

															standar				
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.160.000,00	98.552.324,00	104.112.324,00	83.952.324,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			20.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	28.900.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00							30.004.000,00	
	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	28.900.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			30.004.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat				100 %	100 %	314.795.800,00	203.961.600,00	264.785.100,00	-50.010.700,00							351.775.336,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	13.335.750,00	9.903.750,00	9.903.750,00	-3.432.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			14.669.325,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	18.399.500,00	18.399.500,00	18.399.500,00	0,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalic	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai			20.239.461,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

													Kel/Desa		(HAM).	sesuai dengan standar			
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	226.100.000,00	167.876.676,00	170.116.676,00	-55.983.324,00							248.710.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00	421.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			1.210.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	45.668.000,00	47.908.000,00	17.908.000,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	195.000.000,00	120.687.676,00	120.687.676,00	-74.312.324,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			214.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

												acing			dengan standar				
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	66.846.150,00	59.431.150,00	55.319.650,00	-11.526.500,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			73.530.765,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	14.580.200,00	14.580.200,00	14.580.200,00	0,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			16.038.198,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			1.716.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	200.074.200,00	100.087.000,00	165.022.000,00	-35.052.200,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Kalicacing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			225.581.587,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	%	0,00	0,00	89.995.900,00	89.995.900,00							90.967.900,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				-	4 Unit	0,00	0,00	89.995.900,00	89.995.900,00	Kota Salatiga, Sidomukti, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik			90.967.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang memuat program, kegiatan, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD.

4.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2026, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian khusus:

a. Setiap pergeseran atau penambahan anggaran harus didasarkan pada evaluasi capaian kinerja semester pertama serta urgensi kebutuhan yang bersifat mendesak atau belum terakomodasi pada Renja awal

b. Kualitas perencanaan dan penganggaran harus terus diperkuat, agar setiap rupiah yang digunakan mampu memberikan output dan outcome yang terukur.

c. Apabila alokasi anggaran tidak mencukupi, maka:
   - Kegiatan disesuaikan dengan output yang realistis
   - Pelaksanaan difokuskan pada kegiatan prioritas utama

d. Akurasi perhitungan rincian belanja dan pemenuhan dokumen pendukung teknis—seperti kerangka acuan kerja (KAK) dan rencana anggaran biaya (RAB)—menjadi kunci utama untuk memastikan seluruh usulan kegiatan memenuhi prinsip kepatuhan regulasi dan dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

e. Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2026 dapat berjalan efektif dan akuntabel, maka perlu diperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Berbasis pada prinsip perencanaan terpadu, integratif, dan responsif terhadap isu-isu strategis daerah
b. Selaras dengan dokumen perencanaan lain, seperti RPJMD, Renstra BAPPEDA, RKPD, dan arah kebijakan nasional-provinsi
c. Mengutamakan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan
d. Pelaksanaan harus berorientasi pada hasil (result-oriented), dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala
e. Penggunaan anggaran mengikuti prinsip value for money, memperhatikan efisiensi dan efektivitas

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai kelanjutan dari dokumen Renja ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Menjabarkan Renja ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan digunakan dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
b. Melakukan review berkala atas pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan sasaran pembangunan dan realisasi anggaran

c. Selanjutnya, seluruh bidang terkait diimbau untuk segera memperbarui rencana aksi pelaksanaan kegiatan dan menetapkan jadwal penyerapan anggaran yang tepat agar sisa waktu di tahun anggaran berjalan dapat dimanfaatkan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan

WALI KOTA SALATIGA

ROBBY HERNAWAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telepon (0298) 325159
Fax. (0298) 325159 Situs http://bakesbangpol.salatiga.go.id
Surat elektronik bakesbangpol@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SALATIGA
NOMOR : 200.1.1/112

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang :

1. Bahwa bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, maka perlu dibentuk tim;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga ahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
a. melakukan pengumpulan data pendukung penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
b. melakukan pembahasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.
c. melakukan pengumpulan data dan pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;
e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal, 16 Agustus 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA SALATIGA

SURYANA ADI SETIAWAN, S.T, M.T

Tembusan:
1. Walikota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SALATIGA
NOMOR :
TANGGAL : 16 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SALATIGA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM BADAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Penasehat
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
10.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Penelaah Teknis Kebijakan (2 orang)	Anggota

KEPALA KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA SALATIGA

SURYANA ADI SETIAWAN, S.T, M.T

WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR **000.7.2/446/2025**

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan
b. Bab IV : Penutup.

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal **04 NOV 2025**

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Tembusan:
1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.